

**DAMPAK RELOKASI PASAR TERHADAP EKONOMI PEDAGANG IKAN (STUDI KASUS: PASAR IKAN MODERN MUARA BARU, DKI JAKARTA)**

**THE IMPACT OF MARKET RELOCATION IN THE ECONOMY OF FISH TRADERS (CASE STUDY: MUARA BARU MODERN FISH MARKET, DKI JAKARTA)**

**Muthia Virna Yasmin<sup>1</sup>, Kastana Sapanli<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

<sup>2</sup>Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Email: kastana@apps.ipb.ac.id

**ABSTRACT**

Government's plan to develop national fishery industry faster makes government build modern fish market in Muara Baru that caused PPI Muara Baru fish traders being relocated to it. The purpose of this study was to identify the physical-economic conditions of the fish traders before and after being relocated, to analyze the factors that influence the fish trader's willingness to relocate, to analyze the economic conditions of fish traders before and after being relocated and analyze the institution system of Muara Baru Modern Fish Market. The method used in this study is quantitative descriptive analysis, logistic regression analysis, revenue analysis, and institutional analysis. The results of this study indicate that relocation caused changes in the economic physical condition of fish traders such as KUSUKA members, environmental conditions, market conditions, the number of workers, fish weight total and the number of tub bucket. Factors that influence the willingness of the fish traders to be relocated are government assistance, environmental conditions and coordinations between government and fish traders in relocation planning. Changes in economics condition that occurred to the fish traders are in the form of income decreased by Rp.86.707.566.000 per month. There are three rules of the games of PIM2 Muara Baru's management such as, modern fish market management; rent and fare of stalls; and modern fish market construction.

**Keywords:** income analysis, logistic regression analysis, institutional, economy physical condition, modern fish market

**ABSTRAK**

Rencana pemerintah dalam mempercepat pembangunan industri perikanan nasional membuat pemerintah membangun pasar ikan modern di Muara Baru yang menyebabkan pedagang ikan PPI Muara Baru direlokasi ke pasar tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi fisik ekonomi pedagang ikan sebelum dan setelah direlokasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan pedagang ikan untuk direlokasi, menganalisis perbandingan kondisi ekonomi pedagang ikan sebelum dan sesudah relokasi serta menganalisis sistem kelembagaan di PIM Muara Baru. Metode yang digunakan adalah analisis deksriptif, analisis regresi logistik, analisis pendapatan, dan analisis kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi menyebabkan perubahan kondisi fisik ekonomi pada pedagang ikan seperti keanggotaan KUSUKA, kondisi lingkungan, keadaan pasar, jumlah tenaga kerja (anak buah), total berat ikan dan jumlah penyewaan bak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan pedagang ikan untuk direlokasi yaitu bantuan pemerintah, kondisi lingkungan, serta koordinasi antara pemerintah dan pedagang ikan dalam rencana relokasi. Perubahan kondisi ekonomi yang terjadi kepada pedagang ikan yaitu berupa penurunan pendapatan sebesar Rp.86.707.566.000 per bulan dengan persentase sebesar 61%. Terdapat tiga aturan main dalam pengelolaan PIM Muara Baru antara lain, pengelolaan pasar ikan modern; penyewaan dan tarif lapak; dan pembangunan pasar ikan modern.

**Kata kunci:** analisis pendapatan, analisis regresi logistik, kelembagaan, kondisi fisik ekonomi, pasar ikan modern

---

Muthia Virna Yasmin, Kastana Sapanli. 2020. Dampak Relokasi Pasar Terhadap Ekonomi Pedagang Ikan (Studi Kasus: Pasar Ikan Modern Muara Baru, DKI Jakarta). *Jurnal Mina Sains* 6(2): 76-92.

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sektor perikanan merupakan sektor penting di negara-negara kepulauan termasuk Indonesia. Ikan memiliki nilai gizi yang tinggi sebagai barang konsumsi. Salah satu jenis perikanan yang menguntungkan adalah perikanan tangkap. Perikanan tangkap memiliki nilai jual yang tinggi sehingga dapat menguntungkan nelayan dan pedagang ikan apabila dipasarkan dengan strategi yang baik. Pasar dengan pengelolaan dan penataan yang baik merupakan media bertransaksi yang menguntungkan baik untuk penjual maupun pembeli. Padatnya aktivitas perekonomian terutama diperkotaan membuat pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur yang salah satunya adalah pembangunan pasar.

Pemerintah memiliki visi dalam percepatan peningkatan pertumbuhan infrastruktur pasca panen dan pemasaran produk pertanian. Melalui program Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, salah satu infrastruktur yang dipercepat pembangunannya adalah pasar ikan. Hal tersebut yang menjadi salah satu tujuan didirikannya Pasar Ikan Modern (PIM) di Muara Baru, Jakarta Utara sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan produktivitas ikan serta wujud pembangunan industri perikanan nasional. Pedagang yang berjualan di PIM adalah pedagang-pedagang yang direlokasi oleh pemerintah dari Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Muara Baru. Relokasi pedagang ikan PPI Muara Baru ke PIM Muara Baru menimbulkan dampak yang mempengaruhi proses pemasaran ikan tersebut. Dampak tersebut dapat mempengaruhi biaya usaha, kualitas ikan, serta interaksi dengan pengelola maupun pelanggan. Sistem kelembagaan PIM yang berbeda dengan TPI juga mempengaruhi pedagang ikan dalam memasarkan produk perikananannya.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi fisik ekonomi pedagang ikan Pasar Ikan Modern Muara Baru sebelum dan setelah direlokasi?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan pedagang ikan untuk direlokasi?
3. Bagaimana perbandingan kondisi ekonomi pedagang ikan sebelum dan sesudah relokasi?
4. Bagaimana sistem kelembagaan Pasar Ikan Modern Muara Baru?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Mengidentifikasi kondisi fisik ekonomi pedagang ikan sebelum dan setelah direlokasi
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan pedagang ikan untuk direlokasi
3. Menganalisis perbandingan kondisi ekonomi pedagang ikan sebelum dan sesudah relokasi
4. Menganalisis kelembagaan Pasar Ikan Modern Muara Baru.

## METODE

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena Pasar Ikan Modern Muara Baru merupakan tempat dimana pedagang ikan dari Tempat Pelelangan Ikan Muara Baru direlokasi. Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan pada Desember 2019 - Maret 2020.

### Metode Penentuan Responden

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling*. Dalam penelitian ini, penentuan responden yaitu dengan pertimbangan bahwa responden yang diambil sebelumnya berdagang di PPI Muara Baru dan telah direlokasi ke PIM Muara Baru dengan jumlah populasi sebanyak 422 pedagang

ikan. Jumlah responden diperoleh berdasarkan rumus Slovin (Sugiyono 2011) yaitu:

$$N = \frac{n^2}{Ne^2} = \frac{4221^2}{(0,1)^2} = 80,84 \approx 81 \text{ responden ... (1)}$$

Dimana:

n = ukuran sampel (orang)

N = jumlah populasi (orang)

E = 10%

**Metode Pengambilan dan Analisis Data Identifikasi Kondisi Fisik Ekonomi Pedagang Ikan Sebelum dan Sesudah Direlokasi**

Mengidentifikasi kondisi fisik ekonomi pedagang ikan dilakukan dengan analisis deskriptif melalui metode wawancara langsung dengan responden untuk mengetahui perubahan jumlah sewa bak, keanggotaan KUSUKA, kondisi lingkungan, dan kondisi fisik tempat usaha, total berat ikan, jumlah tenaga kerja. Untuk menjelaskan perbedaan antara kondisi fisik ekonomi pedagang ikan sebelum dan setelah adanya relokasi menggunakan analisis uji non parametrik Wilcoxon. Uji Wilcoxon digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan dari dua sampel yang saling berhubungan (Jubilee 2014), dalam penelitian ini yaitu kondisi sebelum dan setelah adanya relokasi.

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiediaan Pedagang Ikan untuk Direlokasi**

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiediaan pedagang ikan untuk direlokasi dilakukan dengan metode analisis regresi logistik, data diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden yang kemudian diolah. Analisis regresi logistik digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiediaan pedagang ikan dalam pengambilan keputusan apakah bersedia untuk direlokasi atau tidak. Untuk itu, dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesiediaan responden untuk direlokasi ke pasar yang baru.

Dalam penelitian ini, variabel respon (Y) yang digunakan adalah variabel kualitatif yaitu apakah pedagang ikan bersedia untuk direlokasi atau tidak. Model logistik yang digunakan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (Juanda 2009).

$$\text{Logit (pi)} = \beta_0 + \beta_1 \text{BP} + \beta_2 \text{LING} + \beta_3 \text{KP} + \beta_4 \text{KOR} + \beta_5 \text{LU} + \beta_6 \text{PEN} + \epsilon_i \text{ ..... (2)}$$

Keterangan:

Logit (pi) : Peluang responden untuk setuju atau tidak setuju (1= bersedia, 0 = tidak bersedia)

$\beta_0$  : Intersept

$\beta_1$  : Koefisien dari regresi

I : Koefisien dari variabel ke-i (1,2,3,...., n)

BP : Bantuan pemerintah (1= ada, 0= tidak ada)

LING : Kondisi lingkungan sebelum relokasi (1=kotor, 0 = bersih)

KP : Keadaan pasar sebelum relokasi (1=Tidak tertata rapi, 0= Tertata rapi)

KOR : Koordinasi antara pemerintah dan pedagang ikan (1=ada, 0=tidak ada)

LU : Lama usaha (Tahun)

PEN : Selisih pendapatan sebelum dan setelah relokasi (Rp/bulan)

$\epsilon_i$  : Galat

Hipotesis dari faktor-faktor yang diduga memengaruhi keputusan pedagang ikan

dalam kesiediaan relokasi adalah sebagai berikut:

### 1. Bantuan pemerintah (BP)

Bantuan pemerintah diharawikipedia meningkatkan peluang untuk kesediaan pedagang direlokasi ke PIM Muara Baru. Semakin tinggi pedagang ikan yang mendapatkan bantuan pemerintah baik berbentuk barang fisik, fasilitas, maupun bantuan dana, maka akan semakin berpeluang untuk pedagang ikan dalam mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pasar ikan yang modern. Oleh karena itu, semakin tinggi pedagang ikan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah maka peluang pedagang ikan yang bersedia di relokasi akan meningkat.

### 2. Kondisi lingkungan sebelum relokasi (LING)

Kondisi lingkungan diharapkan meningkatkan peluang untuk pedagang ikan direlokasi. Pedagang ikan yang menyatakan bahwa kondisi lingkungan sebelum relokasi tergolong kotor meningkatkan kesediaan pedagang ikan untuk direlokasi. Hal ini dilatarbelakangi hasil dialog bahwa kondisi lingkungan setelah relokasi bersih sesuai dengan perencanaan pemerintah dalam membangun pasar ikan modern yang higienis.

### 3. Keadaan pasar sebelum relokasi (KP)

Keadaan pasar diharapkan meningkatkan peluang untuk pedagang ikan direlokasi. Pedagang ikan yang menyatakan bahwa keadaan pasar sebelum relokasi tergolong tidak tertata rapi meningkatkan peluang pedagang ikan dalam kesediaan direlokasi. Dialog pemerintah dengan pedagang ikan menciptakan gambaran keadaan pasar setelah relokasi tertata rapi dimana dalam perencanaan pembangunan PIM Muara Baru denah lapak penjualan memiliki area masing-masing serta terdapat blok dan nomor yang jelas di setiap lapak.

### 4. Koordinasi antara pemerintah dan pedagang ikan dalam rencana relokasi (KOR)

Koordinasi antara pemerintah dan pedagang ikan dalam rencana relokasi diharapkan meningkatkan peluang untuk

pedagang ikan direlokasi. Dialog serta diskusi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pedagang ikan dalam rencana relokasi membuat para pedagang ikan memahami tujuan dan manfaat didirikannya pasar ikan modern dimana salah satu tujuannya adalah meningkatkan pendapatan pedagang ikan, sehingga apabila pedagang ikan turut serta dalam koordinasi antara pemerintah dan pedagang ikan akan meningkatkan peluang pedagang ikan untuk bersedia direlokasi.

### 5. Lama usaha (LU)

Lama usaha diharapkan berpengaruh negatif terhadap peluang pedagang ikan untuk direlokasi. Hal ini dikarenakan pedagang ikan yang sudah berdagang sejak lama telah memiliki pelanggan tetap serta pendapatan utamanya berasal dari penjualan ikan tersebut, sehingga semakin lama waktu pedagang ikan berjualan di PPI Muara Baru mengakibatkan pedagang ikan tidak bersedia direlokasi.

### 6. Selisih pendapatan sebelum dan setelah relokasi (PEN)

Selisih pendapatan sebelum dan setelah relokasi diharapkan meningkatkan peluang pedagang ikan untuk direlokasi. Apabila pedagang ikan memiliki selisih pendapatan yang besar dimana pendapatan setelah relokasi lebih besar dari pendapatan sebelum relokasi, maka pedagang ikan memiliki peluang lebih besar untuk bersedia di relokasi ke PIM Muara Baru.

### **Analisis Kondisi Ekonomi Pedagang Ikan Sebelum dan Setelah Direlokasi**

Analisis pendapatan diperoleh dengan mencari pendapatan bersih pedagang. Pendapatan bersih diperoleh dari selisih antara penerimaan usaha dengan pengeluaran total. Dalam penelitian ini, pendapatan pedagang ikan diperoleh dari selisih penerimaan yang diperoleh pedagang dari usahanya dengan pengeluaran usaha (belum dikurangi oleh pengeluaran rumah tangga pedagang ikan). Menurut penelitian Talentaningtyas (2016) analisis perubahan

pendapatan tersebut dapat diperoleh dengan modifikasi melalui rumus berikut:

$$\Delta\pi = \pi_1 - \pi_0$$

$$\Delta\pi = (TR_1 - TC_1) - (TR_0 - TC_0) \dots \dots \dots (3)$$

Dimana:

- $\pi_1$  : Pendapatan setelah relokasi (Rp/bulan)  
 $\pi_0$  : Pendapatan sebelum relokasi (Rp/bulan)  
 $TR_1$  : *Total Revenue* setelah relokasi (total penerimaan) (Rp/bulan)  
 $TR_0$  : *Total Revenue* sebelum relokasi (total penerimaan) (Rp/bulan)  
 $TC_1$  : *Total Cost* (total biaya) setelah relokasi (Rp/bulan)  
 $TC_0$  : *Total Cost* (total biaya) sebelum relokasi (Rp/bulan)

Keterangan:

- $\pi_1 > \pi_0$  : Relokasi berhasil meningkatkan pendapatan pedagang ikan  
 $\pi_1 < \pi_0$  : Relokasi tidak berhasil meningkatkan pendapatan pedagang ikan  
 $\pi_1 = \pi_0$  : Relokasi tidak berdampak terhadap pendapatan pedagang ikan

### Analisis Konten/Isi Kelembagaan

*Content analysis* (analisis isi) merupakan bagian dari metode analisis data kualitatif. Menurut Bungin (2007), analisis konten kelembagaan dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkaji aturan formal maupun informal yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta oleh masyarakat setempat tentang segala hal yang berhubungan dengan kegiatan PIM Muara Baru. Aturan yang bisa dijadikan acuan dalam pengelolaan PIM Muara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Analisis kelembagaan juga dilakukan dengan mengkaji hubungan antar *stakeholder*. Berdasarkan kerangka pemikiran Ostrom (1990), menyatakan bahwa untuk menganalisis hubungan antar *stakeholder* dalam sistem kelembagaan perlu

dikelompokkan berdasarkan tingkatannya (*level*). Aktor-aktor yang terlibat dalam Pengelolaan PIM Muara Baru dibedakan atas *level* penentu kebijakan dan pelaksana kebijakan. Pertama, *level* penentu kebijakan (*collective choice level*) yaitu lembaga yang berperan dalam menyusun peraturan untuk dilaksanakan oleh lembaga operasional. Kedua, *level* pelaksana kebijakan (*operational choice level*) yaitu lembaga yang secara langsung melaksanakan kebijakan di lapangan.

Terdapat 8 indikator kelembagaan ideal menurut Ostrom (1990) antara lain, batas-batas yang jelas, kesesuaian antara apropriasi dan ketentuan peraturan dan kondisi lokasi, pengaturan pilihan kolektif, pengawasan, sanksi, mekanisme penyelesaian konflik, pengakuan hak untuk mengatur, serta penghubung antar lembaga. Penjelasan dari ke-8 indikator tersebut disesuaikan dengan komponen dan sistem pengelolaan di PIM Muara Baru. Hasil penilaian indikator tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah kelembagaan PIM Muara Baru sudah ideal.

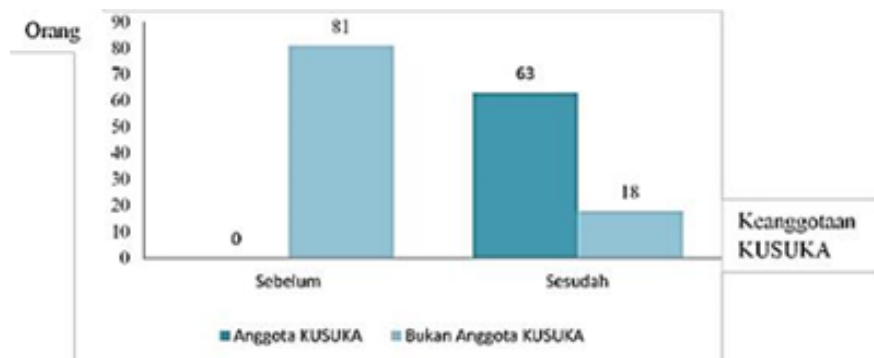
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Terjadinya Relokasi terhadap Kondisi Fisik Ekonomi Pedagang Ikan

#### 1. Keanggotaan KUSUKA

KUSUKA merupakan kartu identitas profesi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh KKP. KUSUKA diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Pedagang ikan yang direlokasi ke PIM Muara Baru akan mendapatkan kartu KUSUKA dari KKP.

Hasil uji non parametrik menghasilkan Sig < 0,05 yaitu  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan keanggotaan KUSUKA sebelum dan setelah adanya relokasi. Pada Gambar 2 menunjukkan tentang perubahan pada keanggotaan pedagang ikan pada KUSUKA sebelum adanya relokasi dan setelah relokasi.



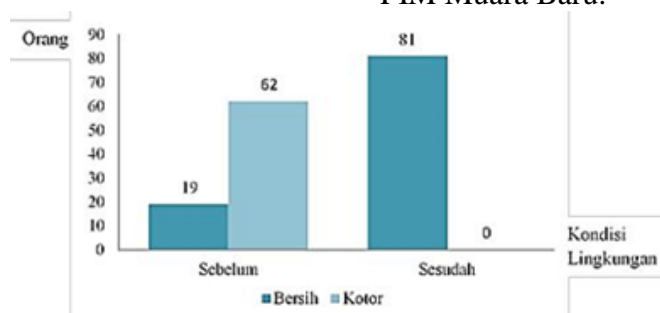
Gambar 1 Keanggotaan KUSUKA. Hasil analisis uji non parametrik Wilcoxon: Asym. Sig = 0,000. Sumber: Data Primer, diolah (2020)

Pada Gambar 2, seluruh pedagang tidak terdaftar dalam keanggotaan KUSUKA pada saat sebelum direlokasi ke PIM Muara Baru. Hal ini dikarenakan kartu KUSUKA baru diterbitkan pada tahun 2017, sehingga dalam implementasinya belum optimal. Setelah direlokasi, mayoritas pedagang ikan memiliki kartu KUSUKA. Pada saat relokasi, KKP memberikan beberapa fasilitas kepada pedagang ikan, salah satunya adalah pemberian kartu anggota KUSUKA kepada para pedagang ikan. Beberapa pedagang ikan yang belum memiliki kartu anggota

KUSUKA disebabkan kartu yang dibuat belum terbit.

## 2. Kondisi Lingkungan

Hasil uji non parametrik menghasilkan Sig < 0,05 yaitu  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan kondisi lingkungan pasar sebelum dan setelah adanya relokasi. Pada Gambar 3 menunjukkan tentang perubahan kondisi lingkungan di pasar tempat pedagang ikan berjualan sebelum adanya relokasi yaitu di PPI Muara Baru dan setelah relokasi yaitu di PIM Muara Baru.



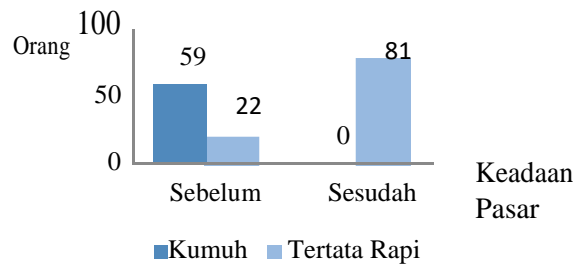
Gambar 2 Perubahan Kondisi Lingkungan Sebelum dan Setelah Relokasi. Hasil analisis uji non parametrik Wilcoxon: Asym. Sig = 0,000. Sumber: Data Primer, diolah (2020)

Pada Gambar 3, mayoritas pedagang ikan menyatakan bahwa kondisi lingkungan

di PPI Muara Baru masih tergolong kotor karena masih banyak sampah yang

berserakan dan air menggenang dan berbau tidak sedap di sekitar pasar. Setelah pedagang ikan direlokasi ke PIM Muara Baru, seluruh responden menyatakan bahwa lingkungan PIM Muara Baru lebih bersih dari lingkungan PPI Muara Baru. Hal ini dikarenakan terdapat saluran buangan air disetiap lapak sehingga air tidak menggenang di sekitar pasar.

**3. Keadaan Pasar**



Gambar 3 Perubahan Keadaan Pasar Sebelum dan Setelah Relokasi. Hasil analisis uji non parametrik Wilcoxon: Asym. Sig = 0,000. Sumber: Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan Gambar 4 mayoritas responden menyatakan bahwa keadaan pasar tempat para pedagang ikan berjualan masih tergolong kumuh. Hal ini disebabkan oleh jenis pasar yang merupakan pasar tradisional, sehingga penataan lapak, kondisi bangunan serta fasilitas di dalamnya masih seadanya dan tidak beraturan.

Keadaan pasar merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pedagang ikan. Hasil uji non parametric menghasilkan Sig < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan keadaan pasar sebelum dan setelah adanya relokasi. Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa terjadi perubahan kondisi pasar sebelum dan setelah adanya relokasi.

**4. Jumlah Tenaga Kerja (Anak Buah)**

Hasil uji non parametrik menghasilkan Sig < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah tenaga kerja sebelum dan setelah adanya relokasi. Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi perubahan jumlah tenaga kerja sebelum dan setelah adanya relokasi.

Tabel 1 Jumlah Tenaga Kerja (TK) Sebelum dan Setelah Relokasi

Sebelum		Setelah	
Jumlah TK(orang)	Jumlah(orang)	Jumlah TK (orang)	Jumlah (orang)
1 orang	8	1 orang	19
2-3 orang	64	2-3 orang	52
≥ 4 orang	9	≥ 4 orang	10
Total	81	Total	81

Rata-rata Jumlah Tenaga Kerja= 3 orang Rata-rata Jumlah Tenaga Kerja = 2 orang  
 Hasil analisis uji non parametrik Wilcoxon: Asym. Sig = 0,000. Sumber: Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 1 sebanyak 64 responden memiliki tenaga kerja sebanyak 2-3 orang, 8 responden memiliki tenaga kerja sebanyak 1 orang, serta 9 responden memiliki tenaga kerja lebih dari 4 orang sebelum direlokasi. Sedangkan setelah direlokasi, sebanyak 52 responden memiliki tenaga kerja sebanyak 2-3 orang, 19 responden memiliki tenaga kerja sebanyak 1 orang, serta 10 responden

memiliki tenaga kerja sebanyak lebih dari 4 orang. Hal ini disebabkan para pedagang ikan menyesuaikan pengeluaran untuk upah tenaga kerja sesuai dengan modal yang dikeluarkan.

**5. Total Volume Ikan**

Hasil uji non parametrik menghasilkan Sig < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini

menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah total volume ikan sebelum dan setelah adanya relokasi. Total volume ikan sebelum

dan setelah relokasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Total Volume Ikan Sebelum dan Setelah Relokasi

Sebelum		Setelah	
Total Volume Ikan (Kg/hari)	Jumlah (orang)	Total Volume Ikan (Kg/hari)	Jumlah (orang)
100-599	1	100-599	34
600-1099	25	600-1099	28
1100-1599	15	1 100-1599	7
1 600-1999	0	1 600-1999	1
≥2000	40	≥2000	11
Total	81	Total	81
Rata-rata Volume Ikan = 2 028.4 kg		Rata-rata Volume Ikan= 990.4 Kg	

Hasil analisis uji non parametrik Wilcoxon: Asym. Sig = 0.000. Sumber: Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa total volume ikan yang dijual oleh pedagang ikan tergolong variatif. Sebelum relokasi terdapat 1 responden yang menjual ikan dalam rentang 100-599 kg, 25 responden yang menjual ikan dalam rentang 600-1.099 kg, 15 responden yang menjual ikan dalam rentang 1.100-1.599 kg, serta 40 responden menjual ikan lebih dari sama dengan 2.000 kg setiap harinya. Sedangkan setelah relokasi terdapat 34 responden yang menjual ikan dalam rentang 100-599 kg, 28 responden yang menjual ikan dalam rentang 600-1.099 kg, 7 responden yang menjual ikan dalam rentang 1.100-1.599 kg, 1 responden yang menjual ikan dalam rentang 1.600-1.999 kilogram serta 11 responden yang menjual ikan dalam rentang lebih dari sama dengan 2.000 kg. Rata-rata berat ikan

yang dijual sebelum relokasi adalah sebesar 2.028,4 kg, sedangkan setelah relokasi sebesar 990.4 kg.

## 6. Jumlah Penyewaan Bak

Pedagang ikan yang berjualan ikan di PPI Muara Baru kemudian direlokasi ke PIM Muara Baru menjual ikannya dengan diletakkan di dalam bak berdiameter 38 sampai 40 cm. Bak yang digunakan oleh para pedagang merupakan bak yang disewa dari penyewa bak yang terdapat di pasar tersebut. Hasil uji non parametrik menghasilkan Sig < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah penyewaan sebelum dan setelah adanya relokasi. Jumlah penyewaan bak sebelum dan setelah relokasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Jumlah Penyewaan Bak Sebelum dan Setelah Relokasi

Sebelum		Setelah	
Jumlah Penyewaan Bak (bak/hari)	Jumlah (orang)	Jumlah Penyewaan Bak (bak/hari)	Jumlah (orang)
2-10	58	2-10	72
11-20	19	11-20	8
> 20	4	> 20	1
Total	81	Total	81
Rata-rata Penyewaaan Bak =13 bak/hari		Rata-rata Penyewaan Bak= 11 bak/hari	

Hasil analisis uji non parametrik Wilcoxon: Asym. Sig = 0.000. Sumber: Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah penyewaan bak sebelum dan setelah relokasi. Sebelum relokasi, terdapat 58 responden yang

menyewa bak dalam rentang 2-10 bak, 19 responden menyewa bak dalam rentang 11-20 bak, serta 4 responden yang menyewa lebih dari 20 bak. Sedangkan setelah relokasi,



terdapat 72 responden yang menyewa dalam rentang 2-10 bak, 8 responden menyewa dalam rentang 11-20 bak, serta hanya 1 responden menyewa lebih dari 20 bak setiap harinya. Rata-rata penyewaan bak sebelum relokasi sebesar 13 bak per hari dan setelah relokasi sebesar 11 bak per hari.

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiediaan Pedagang Ikan untuk Direlokasi**

Berdasarkan penelitian Molandari (2017), beberapa faktor pendukung

efektivitas relokasi pasar adalah aturan hukum yang jelas, koordinasi dengan tim khusus, serta partisipasi masyarakat. Demi mewujudkan program pemerintah, para pedagang ikan diharuskan untuk pindah ke PIM Muara Baru. Hasil pengolahan data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 60,5% (49 responden) menyatakan tidak bersedia untuk direlokasi dan sebanyak 32 responden (39,5% ) menyatakan bersedia untuk direlokasi.

Tabel 4 Hasil uji analisis regresi logistik kesiediaan pedagang ikan untuk direlokasi

Variabel peubah	Koefisien	p- value	Odds ratio
Constant	-2,272	0,030	0,103
BP	2,608	*0,015	13,574
LING	-2,347	*0,022	0,096
KP	1,285	0,127	3,616
KOR	1,292	*0,021	3,642
LU	-0,003	0,924	0,997
PEN	-2,26E-11	0,851	1,000

-2 Log likelihood = 93,949  
 Omnibus Tests of Model Coefficients: Chi-square= 14,746, df= 6 , p-value= 0,022  
 Goodness of fit  
 Hosmer and Lemeshow: Chi-square = 7,890, df=8 , p-value= 0,444  
 Nagelkerke R-square= 0,225 Classification plot = 66,7

\*) Signifikan pada taraf nyata 5%. Sumber: Output SPSS (2020)

Pada analisis regresi logistik dilakukan beberapa uji parameter untuk melihat hasil dari model yang digunakan. Uji parameter yang digunakan yaitu uji secara keseluruhan dengan uji Likelihood ratio, uji kecocokan model (Goodness of fit), dan uji parsial

dengan uji Wald. Hasil uji analisis regresi logistik dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan hasil uji analisis regresi logistik pada Tabel 4 maka model persamaan regresi logistik yang diperoleh sebagai berikut.

$$\text{Logit (pi)} = -2,272 + 2,608BP - 2,347LING + 1,285KP + 1,292KOR - 0,003LU - 0,000000000226PEN$$

Keterangan:

Logit (pi) : Peluang responden untuk setuju atau tidak setuju (1= bersedia, 0 = tidak bersedia)

$\beta_0$  : Intersept

$\beta_1$  : Koefisien dari regresi

I : Koefisien dari variabel ke-i (1,2,3,....., n)

BP : Bantuan pemerintah (1= ada, 0= tidak ada)

LING : Kondisi lingkungan sebelum relokasi (1=kotor, 0 = bersih)

KP : Kondisi pasar sebelum relokasi (1=Kumuh, 0= Tertata rapih)

KOR : Koordinasi antara pemerintah dan pedagang ikan dalam rencana relokasi (1=ada, 0=tidak ada)

LU : Lama usaha (Tahun)

PEN : Selisih pendapatan sebelum dan setelah relokasi (Rp/bulan)

### a) Uji Likelihood Ratio

Tujuan uji *likelihood ratio* adalah untuk menguji kelayakan model dan mengetahui peran variabel-variabel peubah/penjelas (X) dalam model secara bersama-sama atau simultan. Pengujiannya yaitu dengan melihat nilai signifikansi (*p-value*), jika nilai *p-value* lebih kecil dari taraf nyata ( $\alpha$ ) maka keputusannya adalah tolak  $H_0$  yang artinya adalah minimal terdapat satu variabel peubah (X) yang mempengaruhi variabel respon (Y) secara signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model *fit* atau dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Berdasarkan pada Tabel 4, hasil uji secara keseluruhan dengan menggunakan uji *likelihood ratio* menunjukkan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,022 Nilai *p-value* tersebut lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan yaitu sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ), sehingga keputusan yang diperoleh adalah tolak  $H_0$  yang artinya variabel peubah (X) yang digunakan pada model secara bersama-sama dapat menjelaskan kesediaan pedagang ikan untuk direlokasi.

### b) Uji Goodness of Fit

#### 1. Uji Hosmer and Lemeshow

Hasil dari pengolahan data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji *Hosmer and Lemeshow* yaitu sebesar 0.444. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari taraf nyata 5% ( $\alpha = 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik mampu menjelaskan data dan cukup layak untuk digunakan pada tingkat keyakinan 95%.

#### 2. Uji Nagelkerke R-Square

Berdasarkan hasil dari pengolahan data pada Tabel 4, nilai uji *Nagelkerke R-Square* yaitu sebesar 0.225 Hal ini menunjukkan bahwa variabel peubah (X) mampu menjelaskan 22.5% keragaman faktor-faktor pada model yang berpengaruh terhadap kesediaan pedagang ikan untuk direlokasi. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 77.5% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain

diluar variabel peubah dalam persamaan hasil regresi logistik tersebut.

### 3. Classification Plot

Hasil dari pengolahan data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan keakuratan kondisi yang terjadi sebesar 66.7% secara benar.

### c) Uji Wald

Berdasarkan hasil uji analisis regresi logistik pada Tabel 4, terdapat 3 variabel peubah yang mempengaruhi secara signifikan terhadap kesediaan pedagang ikan untuk direlokasi. Variabel tersebut adalah bantuan pemerintah, kondisi lingkungan, serta koordinasi antara pemerintah dan pedagang ikan dalam rencana relokasi.

#### a. Bantuan Pemerintah

Variabel BP yaitu bantuan pemerintah memiliki nilai signifikansi 0.01 yang lebih kecil dari taraf nyata ( $\alpha$ ) yang digunakan yaitu 0.05, artinya variabel bantuan pemerintah mempengaruhi secara signifikan terhadap kesediaan pedagang ikan untuk direlokasi. Berdasarkan hasil uji analisis regresi logistik pada Tabel 4, diperoleh bahwa variabel bantuan pemerintah berpengaruh positif. Variabel bantuan pemerintah memiliki *odd ratio* sebesar 13.574, yang artinya pedagang ikan yang mendapatkan bantuan pemerintah memiliki peluang 13.574 kali lebih besar untuk bersedia direlokasi dibandingkan pedagang ikan yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah.

#### b. Kondisi lingkungan sebelum direlokasi

Variabel LING yaitu kondisi lingkungan sebelum direlokasi memiliki nilai signifikansi 0.022 yang lebih kecil dari taraf nyata ( $\alpha$ ) yang digunakan yaitu 0.05, artinya variabel kondisi lingkungan sebelum direlokasi mempengaruhi secara signifikan terhadap kesediaan pedagang ikan untuk direlokasi. Berdasarkan hasil uji analisis regresi logistik pada Tabel 4, diperoleh bahwa variabel kondisi lingkungan sebelum

direlokasi berpengaruh negatif. Variabel kondisi lingkungan sebelum direlokasi memiliki *odd ratio* sebesar 0.096, yang artinya pedagang ikan dengan kondisi lingkungan pasar yang kotor memiliki peluang 0.096 kali lebih besar untuk bersedia direlokasi dibandingkan pedagang ikan dengan kondisi lingkungan pasar yang bersih.

#### c. Koordinasi Antara Pemerintah dan Pedagang Ikan dalam Rencana Relokasi

Variabel KOR yaitu koordinasi antara pemerintah dan pedagang ikan dalam rencana relokasi memiliki nilai signifikansi 0.021 yang lebih kecil dari taraf nyata ( $\alpha$ ) yang digunakan yaitu 0.05, artinya variabel koordinasi antara pemerintah dan pedagang ikan dalam rencana relokasi mempengaruhi secara signifikan terhadap kesediaan pedagang ikan untuk direlokasi. Berdasarkan hasil uji analisis regresi logistik pada Tabel 4, diperoleh bahwa variabel koordinasi antara pemerintah dan pedagang ikan dalam rencana relokasi berpengaruh positif. Variabel koordinasi antara

pemerintah dan pedagang ikan dalam rencana relokasi memiliki *odd ratio* sebesar 3.642, yang artinya pedagang ikan yang ikut berkoordinasi dengan pemerintah dalam rencana relokasi memiliki peluang 3.642 kali lebih besar untuk bersedia direlokasi dibandingkan pedagang ikan yang tidak ikut berkoordinasi dengan pemerintah dalam rencana relokasi.

### Perbandingan Kondisi Ekonomi Pedagang Ikan Sebelum dan Setelah Direlokasi

#### Analisis Perubahan Penerimaan Pedagang Ikan

Hasil uji non parametrik pada Tabel 5 menghasilkan Sig < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan penerimaan pedagang ikan sebelum dan setelah adanya relokasi. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perubahan yaitu berupa penurunan penerimaan pedagang ikan. Perubahan penerimaan pedagang ikan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Perubahan Penerimaan Pedagang Ikan PIM Muara Baru Sebelum dan Setelah Direlokasi

Jenis	Nilai (Rp/bulan)
Penerimaan sebelum relokasi	191.256.000.000
Penerimaan setelah relokasi	90.743.550.000
Selisih	100.512.450.000
Perubahan perubahan pendapatan (per pedagang ikan)	1.240.894.444
Hasil analisis uji non parametrik Wilcoxon: Asymp. Sig= 0.000	

Sumber: Data Primer, diolah (2020)

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa terjadi penurunan penerimaan pedagang ikan PIM Muara Baru akibat adanya relokasi. Penurunan penerimaan tersebut sebesar Rp.100.512.450.000 per bulan dengan persentase perubahan sebesar 53%. Perubahan penurunan pendapatan pedagang ikan yaitu sebesar Rp 1.240.894.444 per pedagang ikan per bulan dengan sampel sebanyak 81 pedagang ikan. Penurunan penerimaan tersebut disebabkan lapak yang jauh dari pengepakan, penurunan

pembeli, serta kehilangan pelanggan tetap. Beberapa pedagang ikan yang mendapatkan lapak jauh dari pengepakan terkena dampak penurunan penerimaan yang cukup besar.

#### Analisis Perubahan Pengeluaran Usaha Pedagang Ikan

Berikut ini merupakan perubahan pengeluaran pedagang ikan dapat dilihat pada Tabel 6. Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengeluaran pedagang ikan di PIM Muara Baru.

Tabel 6 Perubahan Pengeluaran Pedagang Ikan PIM Muara Baru Sebelum dan Setelah Direlokasi

Jenis	Nilai (Rp/bulan)
Pengeluaran sebelum relokasi	35.125.950.000
Pengeluaran setelah relokasi	35.259.916.000
Selisih	133.966.000
Perubahan peningkatan pengeluaran (per pedagang ikan)	1.653.901,235
Hasil analisis uji non parametik Wilcoxon: Asymp. Sig= 0.047	
Sumber: Data Primer, diolah (2020)	

Peningkatan pengeluaran tersebut sebesar Rp 133.966.000 per bulan dengan persentase perubahan sebesar 0.38%. Perubahan peningkatan pengeluaran pedagang ikan yaitu sebesar Rp 1.653.901,235 per pedagang ikan per bulan dengan sampel sebanyak 81 pedagang ikan. Hasil uji non parametik pada Tabel 6 menghasilkan Sig < 0,05 yaitu 0,047 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pengeluaran pedagang ikan sebelum dan setelah adanya relokasi.

### Analisis Perubahan Pendapatan Pedagang Ikan

Hasil uji non parametik pada Tabel 7 menghasilkan Sig < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapatan pedagang ikan sebelum dan setelah relokasi. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perubahan yaitu berupa penurunan pendapatan pedagang ikan. Perubahan pendapatan pedagang ikan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Perubahan Pendapatan Pedagang Ikan PIM Muara Baru Sebelum dan Setelah Direlokasi

Jenis	Nilai (Rp/bulan)
Pendapatan sebelum relokasi	155.151.200.000
Pendapatan setelah relokasi	55.483.634.000
Selisih	99.667.566.000
Perubahan penurunan pendapatan (per pedagang ikan)	1.230.463.778
Hasil analisis uji non parametik Wilcoxon: Asymp. Sig= 0,000	
Sumber: Data Primer, diolah (2020)	

Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa terjadi penurunan pendapatan pedagang ikan PIM Muara Baru akibat adanya relokasi pasar. Penurunan pendapatan tersebut sebesar Rp 99.667.566.000 per bulan dengan persentase perubahan sebesar 64%. Perubahan penurunan pendapatan pedagang ikan yaitu sebesar Rp 1.230.463.778 per pedagang ikan per bulan dengan sampel sebanyak 81 pedagang ikan. Penyebab penurunan pendapatan pedagang ikan sama halnya dengan penurunan penerimaan pedagang ikan yakni jauhnya lapak dari

lokasi pengepakan ikan, berkurangnya pembeli, hilangnya pelanggan tetap.

### Kelembagaan Pasar Ikan Modern Muara Baru

Hasil analisis kelembagaan pengelolaan PIM Muara Baru dijelaskan pada Lampiran 2. Kelembagaan pengelolaan di PIM Muara Baru mencakup 8 indikator kelembagaan yang ideal. Namun demikian, pelaksanaan dari indikator tersebut belum sepenuhnya optimal.

### **Analisis Substansi Kelembagaan Formal Pasar Ikan Modern Muara Baru**

Aturan formal menjadi pedoman dalam mengatur seluruh aktivitas perdagangan di PIM Muara Baru. Aturan yang berlaku dalam pengelolaan PIM Muara Baru adalah Peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut dikarenakan PIM Muara Baru merupakan Barang Milik Negara (BMN) di bawah KKP. Namun demikian, Perum Perindo yang ditunjuk sebagai pengelola juga memiliki kebijakan dalam pengelolaan PIM Muara Baru dengan berdasarkan peraturan dari pemerintah pusat. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam pembangunan PIM Muara Baru adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara

Berdasarkan ketujuh landasan hukum tersebut terdapat tiga aturan main dalam pengelolaan PIM Muara Baru diantaranya adalah pengelolaan pasar ikan modern, penyewaan dan tarif lapak serta pembangunan pasar ikan modern.

### **Analisis Substansi Kelembagaan Informal Pasar Ikan Modern Muara Baru**

Kelembagaan informal yang terdapat pada pengelolaan PIM Muara Baru terdapat pada pengamanan dan organisasi pada pasar ikan modern tersebut. Sebelum relokasi, keamanan PPI Muara Baru tidak sebaik keamanan PIM Muara Baru saat ini. Banyak

preman yang mengganggu keamanan dan ketertiban area pasar PPI Muara Baru. Beberapa pedagang ikan bahkan harus menyembunyikan senjata tajam pada saat berjualan di PPI Muara Baru sebagai pertahanan diri apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pungutan liar maupun pencurian ikan. Banyaknya preman yang meresahkan pedagang ikan PPI Muara Baru saat itu disebabkan oleh belum berdirinya kantor kepolisian sektor di area tersebut. Oleh karena itu, ASPIM bersepakat membentuk organisasi keamanan yang anggotanya merupakan masyarakat sekitar termasuk preman yang berada di sekitar pasar tersebut. Organisasi tersebut adalah PAMSWAKARSA (Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa). Tugas dari PAMSWAKARSA sendiri adalah untuk melindungi serta mengamankan area sekitar pasar sehingga dapat mencegah tindakan kriminal yang tidak diinginkan juga dapat mengganggu kenyamanan pedagang ikan maupun pembeli. Selain itu juga pendirian PAMSWAKARSA juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pedagang ikan dan masyarakat sekitar dalam menjalin relasi yang lebih harmonis.

### **Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan PIM Muara Baru**

Relokasi di PIM Muara Baru sebenarnya sudah dilakukan diskusi bersama antara pedagang ikan dan pemerintah, namun saran dari pedagang ikan mengenai denah pembangunan tidak diindahkan oleh pemerintah, misalnya pedagang ikan tidak menyetujui pengepakan dan pembongkaran ikan yang hanya satu arah sehingga pedagang ikan yang jauh dari lapak merasa dirugikan karena terkendala akses mobilitas dari lapak ke pengepakan dan pembongkaran.

Tipe pengelolaan PIM Muara Baru yang bersifat konsultatif dimana awalnya hanya terdapat mekanisme dialog antar pemerintah dan pedagang ikan tetapi pengambilan keputusan masih dilakukan pemerintah, kemudian baru bersifat kooperatif dimana pemerintah dan pedagang ikan bekerja sama

dalam pengambilan keputusan sebagai partner yang memiliki posisi tawar yang sama saat konflik mulai terjadi. Penerapan sistem modern di PIM Muara Baru juga belum optimal, dimana para pedagang masih menggunakan pembayaran secara tunai tidak *cashless* seperti yang direncanakan KKP. Selain itu, pedagang ikan yang awalnya diinstruksikan untuk memakai seragam saat berjualan, pada saat penelitian berlangsung tidak ada sama sekali yang menggunakan seragam dalam berdagang. Oleh karena itu, pembangunan PIM Muara Baru dapat dikatakan belum optimal dari segi manajemen bangunan pasar dan manajemen pedagang ikan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut KKP dan Perum Perindo perlu membuat kebijakan yang tegas dalam hal pengelolaan pedagang ikan. Kebijakan tersebut dapat berupa tata aturan yang wajib dilaksanakan di PIM Muara Baru seperti menggunakan seragam, tidak merokok saat berjualan serta memakai sepatu boot.

Selain itu, kebijakan untuk mengadakan rapat rutin dengan pedagang ikan diperlukan agar tidak terjadi perbedaan pendapat antara pedagang ikan dan pengelola PIM Muara Baru. KKP juga dapat menyediakan *marketplace* dan mewajibkan para pedagang ikan memasarkan hasil perikanannya secara online juga sehingga kesan modern pada pasar ini lebih terasa dan penjualan ikan bisa meningkat setiap harinya.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perubahan kondisi fisik ekonomi pada pedagang ikan setelah relokasi yaitu keanggotaan KUSUKA, kondisi lingkungan, keadaan pasar, jumlah tenaga kerja, total berat ikan, serta jumlah penyewaan bak.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap kesediaan pedagang ikan untuk direlokasi yaitu bantuan pemerintah, kondisi lingkungan, serta koordinasi antara pemerintah dan pedagang ikan dalam rencana relokasi.
3. Perubahan kondisi ekonomi yang terjadi kepada pedagang ikan yaitu berupa penurunan sebesar 53%, peningkatan pengeluaran usaha sebesar 0,38% dan penurunan pendapatan sebesar 64%.
4. Aturan main terkait pengelolaan PIM Muara Baru pelaksanaannya belum optimal. Kurangnya koordinasi antara KKP, pengelola PIM Muara Baru dan pedagang ikan dalam hal ini diwakili ketua ASPIM (Asosiasi Pedagang Ikan Muara Baru) menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bungin B. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta (ID): Kencana Prenada Media Group.
- Jubilee E. 2014. *SPSS Untuk Pemula*. Yogyakarta (ID): PT. Elex Media Komputindo.
- Juanda B. 2009. *Ekonometrika Pemodelan dan Pendugaan*. Bogor (ID): IPB Press.
- Molandari F. 2017. Efektivitas Relokasi Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmu Sosial*. 6(1):13.
- Ostrom E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institution for Collective Action*. New York: Cambridge University Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Talentaningtyas T. 2016. Analisis Perubahan Pendapatan dan Kesiediaan Pengusaha Tahu untuk Kontribusi dalam Upaya Pengolahan Limbah. [Skripsi]. Bogor(ID): Institut Pertanian Bogor.

**Lampiran 1**

Tabel Indikator Kelembagaan Ideal

No.	Substansi Indikator Tata Kelola Kelembagaan	Penjelasan
1.	Batas-batas yang jelas ( <i>clearly defined boundaries</i> )	Siapa saja pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk mengakses dan memanfaatkan PIM Muara Baru serta sejauh mana pasar dapat diakses dan dimanfaatkan.
2.	Kesesuaian antara apropriasi dan ketentuan peraturan dan kondisi lokasi ( <i>congruence between appropriation and provision rules and local condition</i> )	Aturan alokasi yang membatasi waktu, tempat, teknologi dan jumlah unit fasilitas pasar yang diperbolehkan untuk digunakan serta aturan mengenai penyediaan dalam hal tenaga kerja, material, modal/budget.
3.	Pengaturan pilihan kolektif ( <i>collective-choice arrangements</i> )	Aksi bersama yang dilakukan oleh pedagang ikan yaitu banyaknya pedagang ikan yang terdampak dapat ikut berpartisipasi dalam mengubah aturan-aturan operasional.
4.	Pengawasan ( <i>monitoring</i> )	Pihak pengelola secara aktif berperan dalam audit kondisi pasar serta perilaku pedagang ikan; dalam prosesnya harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum bagi kedua pihak.
5.	Sanksi ( <i>graduated sanction</i> )	Apabila ada pihak yang melanggar aturan main, sanksi yang ditegakkan sesuai dengan tingkat keseriusan dan konteks pelanggaran yang dilakukan baik sesama pihak yang berwenang atau kedua belah pihak.
6.	Mekanisme penyelesaian konflik ( <i>conflict-resolution mechanism</i> )	Pedagang ikan dan pengelola memiliki akses yang mudah ke arena aksi untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi, baik antar pedagang ikan maupun antara pedagang ikan dan pengelola.
7.	Pengakuan hak untuk mengatur ( <i>minimal recognition of rights to organize</i> )	Hak pengelola untuk merancang kelembagaan pasar dan sedikit adanya campur tangan pihak-pihak luar.
8.	Penghubung antar lembaga ( <i>nested enterprises</i> )	Pemanfaatan, penyediaan, pengawasan, penegakan, penyelesaian konflik, dan kegiatan pemerintahan diselenggarakan dalam beberapa lapisan kelembagaan yang saling melengkapi.

Sumber: Ostrom (1990) dengan modifikasi

## Lampiran 2

Tabel Hasil Analisis Kelembagaan Pengelola PIM Muara Baru

No.	Substansi Indikator Tata Kelola Kelembagaan	Penjelasan
1.	Batas-batas pengelolaan pasar ( <i>clearly defined boundaries</i> )	<i>Stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan PIM Muara Baru yang tertulis secara hukum antara lain KKP dan Perum Perindo, sedangkan organisasi yang terlibat dalam pengelolaan PIM Muara Baru namun belum tertulis secara hukum adalah ASPIM, PAMSWAKARSA, serta KOPARKIN.
2.	Kesesuaian antara bantuan maupun pemberian yang diberikan pemerintah dengan kondisi lokal ( <i>congruence between appropriation and provision rules and local condition</i> )	Bantuan yang diberikan pemerintah pada pedagang ikan yang harus direlokasi dirasakan kurang bagi pedagang ikan. Hal ini dikarenakan bantuan pemerintah hanya berupa bantuan 2 fiber, pembagian kartu KUSUKA yang manfaatnya belum dirasakan oleh pedagang ikan, sedangkan bantuan kredit juga sebagian besar pedagang ikan tidak memanfaatkannya dikarenakan takut menunggak.
3.	Pilihan penentu kebijakan ( <i>collective-choice arrangements</i> )	ASPIM pada saat perencanaan relokasi telah diikutsertakan oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan PIM Muara Baru, akan tetapi pemerintah tidak memasukkan saran ASPIM dalam ketetapan perencanaan. Akan tetapi, setelah adanya konflik dengan pengelola, keinginan serta tuntutan ASPIM telah ditanggapi oleh pengelola dan KKP.
4.	Pengawasan ( <i>monitoring</i> )	Pengawasan pada PIM Muara Baru dilakukan oleh pengelola PIM Muara Baru oleh staf keamanan dan operasional serta PAMSWAKARSA. Pengawasan dalam hal ini menjaga keamanan, ketertiban, pemeliharaan serta mengontrol kondisi lapak, fasilitas yang menunjang proses pemasaran ikan di PIM Muara Baru. Adanya kerjasama pengelola dan masyarakat dalam hal ini PAMSWAKARSA membuat pengawasan di PIM Muara Baru tergolong baik.



5.	Sanksi ( <i>graduated sanction</i> )	Sanksi yang diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para penyewa lapak dan kios. Kesalahan tersebut terkait dengan proses penyewaan lapak dan pemeliharaan fasilitas. Namun, dalam kenyataan di lapang sampai sekarang penerapan sanksi belum berjalan dengan baik. Saat ini, pengelola masih mengupayakan tindakan persuasive untuk menjaga hubungan baik dengan pedagang ikan.
6.	Mekanisme penyelesaian konflik ( <i>conflict-resolution mechanism</i> )	Penyelesaian konflik antar pengelola dan pedagang ikan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Belum ada aturan hukum yang berlaku dalam mekanisme penyelesaian konflik antar pengelola dan pedagang ikan. Terdapat beberapa konflik antara pemerintah dan pedagang ikan diantaranya pengurangan lapak di PIM Muara Baru sehingga banyak pedagang ikan harus pindah lokasi serta berhenti berdagang. Selain itu, seringnya terjadi banjir rob menyebabkan adanya genangan air di sekitar area masuk pasar pada waktu-waktu tertentu. Hal ini dikarenakan adanya peninggian jalan dan pembuatan gorong-gorong air tahun 2006-2009 namun tidak sampai pintu masuk Pelabuhan Samudera Nizam Zachman, sehingga menyebabkan banjir dari tanda pintu masuk pelabuhan hingga pelabuhan.
7.	Pengakuan hak untuk mengatur ( <i>minimal recognition of rights to organize</i> )	Keputusan serta peraturan yang berlaku di PIM Muara Baru diserahkan dan sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab pengelola dalam hal ini Perum Perindo.
8.	Penghubung antar lembaga ( <i>nested enterprises</i> )	Lembaga yang terlibat hanya KKP, Perum Perindo, PAMSWAKARSA, serta ASPIM dimana lembaga-lembaga tersebut memiliki peran masing-masing. Hubungan yang kuat antar lembaga perlu dibina agar keselarasan tujuan dan keinginan dapat terwujud dengan baik.

Sumber: Data Primer (2020)